BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Kehutanan
Edisi : 07 Mei 2008
Halaman : 03

Kasus Alih Fungsi Hutan

DPR dan Menhut Bersekongkol

[JAKARTA] Sejumlah pertemuan dan kunjungan lapangan beberapa anggota Komisi IV DPR tidak diketahui pimpinan komisi itu. Pertemuan dan kunjungan itu difasilitasi pemerintah daerah terkait dengan rencana alih fungsi hutan mangrove (hutan lindung) untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Api Api di Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dokumen dan informasi yang diperoleh *SP* menyebutkan bahwa pada 21 September 2006 telah dilakukan kunjungan sejumlah anggota Komisi IV yang difasilitasi Gubernur Sumatera Selatan, Syahrial Osman. Kunjungan itu baru diketahui pimpinan Komisi IV setelah para anggota kembali.

"Pimpinan Komisi IV saat itu sempat menegur para anggotanya," demikian sumber *SP*.

Selain kunjungan itu, ketika Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan presentasi pada Oktober 2006 di Komisi IV juga tidak diketahui pimpinan komisi itu. Insiden tersebut membuat pimpinan tertinggi Komisi IV kembali melakukan teguran.

Dari penelusuran *SP*, persekongkolan untuk meloloskan alih fungsi tersebut sebenarnya sudah bagian dari skenario bersama dari sekelompok pimpinan DPR, anggota Komisi IV, Menteri Kehutanan dan Gubernur Sumsel.

Bahkan, lobi kelompok ini juga mempertemukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan investor pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api (Ras Al-Khaimah/RAK) pada pada pertengahan 19 Maret 2008 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Pada pertemuan ini, RAK diwakili Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi yang merupakan putra mahkota UEA.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Selasa (6/5) masih menggeledah sejumlah perkantoran di Palembang, Sumsel, terkait kasus alih funsi hutan untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api. Pengeledahan dilakukan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel serta Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Tanjung Api Api (BPPK TAA). Sehari sebelumnya, tim penyidik KPK juga menggeledah Kantor Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel dan PT Chandratex Indo Artha.

Sasaran penggeledahan tim penyidik KPK langsung masuk ruang kerja Dirut Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Tanjung Api Api, Sofyan Rebuin, dan memeriksa berkas dari beberapa ruang direktur. Penggeledahan juga berlangsung di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, yakni ruangan kepala dinas dan Kasubag Keuangan.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Secara terpisah, mantan Ketua Komisi IV DPR, Yusuf Faishal, meminta agar Komisi IV DPR membuat Pakta Integritas yang menyatakan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas kejadian kekisruhan/ kekhilafan di Komisi IV. Komisi IV juga harus berjanji melaksanakan tugas sesuai fungsi DPR yang bebas KKN dan beretika tinggi. Komisi IV juga harus berjanji turut mencegah KKN di DPR agar tercipta *clean parliament*.

Baloi

Selain hutan lindung di Bintan dan Banyuasin, kini giliran Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah yang dikabarkan akan diperiksa KPK terkait pengalihfungsian hutan lindung Baloi. Namun, dia membantah telah menerima surat pemeriksaan KPK. "Tidak Benar," katanya kepada *Antara*.

Gubernur Ismeth mengaku tidak tahu pemeriksaan KPK terhadap lima pejabat Batam terkait pengalihfungsian hutan lindung Baloi. Mereka yang diperiksa KPK di Poltabes Barelang, Selasa (6/5), di antaranya Direktur Lahan OB Daniel Yunus, mantan Direktur Lahan OB Agus Hartanto yang saat ini menjabat Kabiro Umum OB, Kepala Dinas KP2 Kota Batam Suhartini dan Sekretaris Kota Batam Agussahiman. [133/H-12/Y-3]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup